

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH

KABUPATEN SUMBA TIMUR

TAHUN 2018-2021

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

Nama : Rambu Anahida

NIM : 12180272

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rambu Anahida
NIM : 12180272
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Bisnis
Jenis Karya : Skripsi/Tesis/Disertasi (tulis salah satu)

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2018-2021”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 12 April 2020

Yang menyatakan



(Rambu Anahida)
NIM.12180272



HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

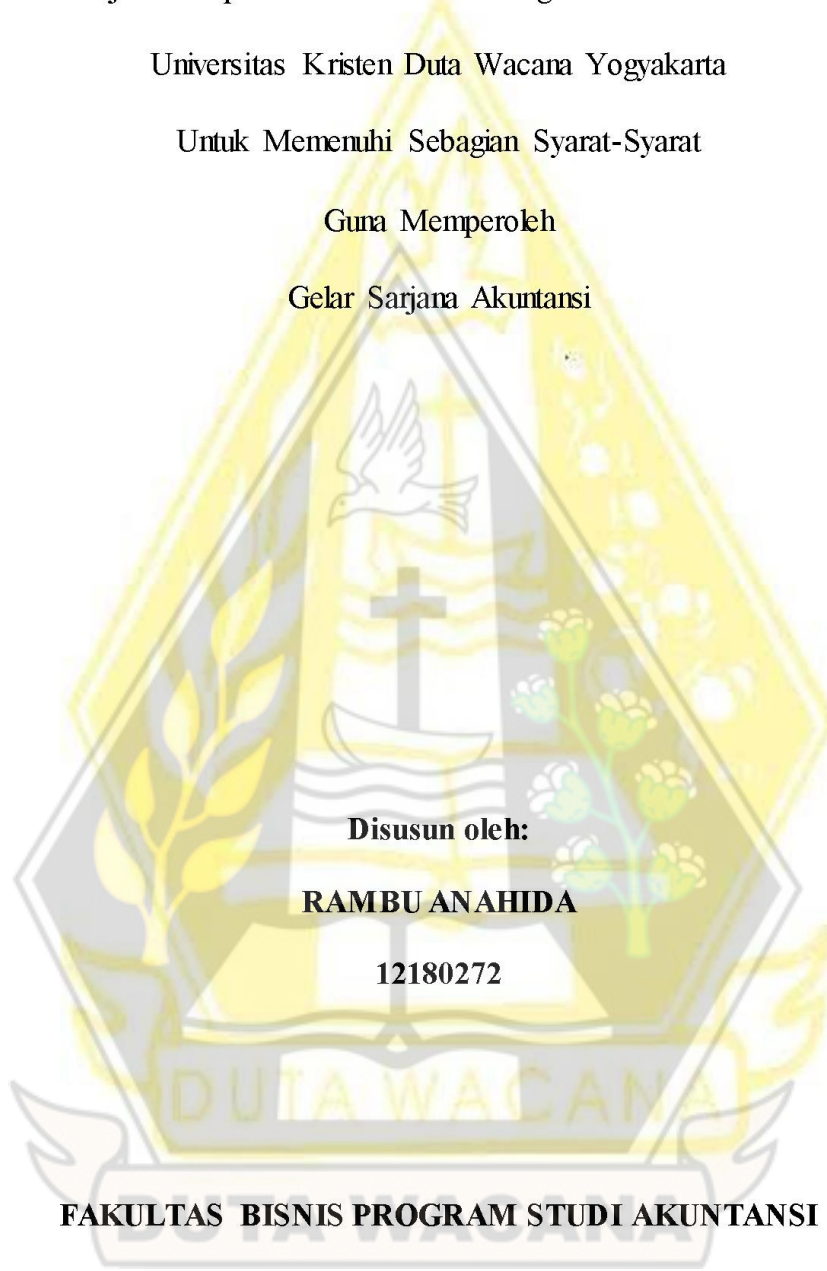
Diajukan kepada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi



Disusun oleh:

RAMBU ANAHIDA

12180272

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH

KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2018-2021 ”

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

RAMBU ANAHIDA

12180272

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal 02 Agustus 2022

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Eka Adhi Wibowo, SE., M.Sc.
(Ketua Tim Penguji)
2. Rossalina Christanti, SE., M.Acc.
(Dosen Penguji)
3. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si
(Dosen Pembimbing)







Yogyakarta, 12 Agustus 2022

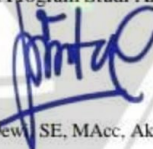
Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi







Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.

Christine Novita Dew, SE, MAcc, Ak, CA, CMA.,CPA.

DUTA WACANA

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul :

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2018-2021

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah tercantum sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 13 Juli 2022



Rambu Anahida

12180272



HALAMAN MOTTO

“Doa orang tua adalah kunci kesuksesan anak”

“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang” (**Amsal 23:18**)

“Dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja” (**Amsal 14:23**)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kekuatan selama mengerjakan skripsi
2. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si yang membimbing saya, memberi nasehat dan motivasi kepada saya.
3. Kepada bapa dan mama, Umu Hambandima S.pt dan Rambu Day Duka yang selalu memberi semangat, dukungan agar menyelesaikan kuliah dengan baik dan tepat waktu dan yang selalu mendukung dalam doa untuk penulis.
4. Kepada ke tiga adik saya tercinta, Tutu adi, Tutu Meyang dan Umu, ambu serta keluarga besar saya yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Pemuda-Pemudi GKS Tanalingu yang selalu mendukung dalam doa dan yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bestie Putu Ryani yang selalu membantu dalam mengerjakan skripsi dan saling mendukung
7. Pdt. Marinus Mardi Ishak S.th yang selalu memberikan motivasi,sema ngat dan selalu mendukung dalam doa dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi dan yang selalu mendorong untuk tidak malas dalam mengerjakan skripsi, Reni felniman dan Veby Haning.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018-2021. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana S1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
- 2) Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam hal ini (Badan Keuangan dan Aset Daerah) yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan
- 3) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Yogyakarta 15 juli 2022



Rambu Anahida

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kontribusi Penelitian	8
1.5 Batasan Penelitian.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Kinerja.....	10
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	11
2.1.3 Analisis SWOT.....	12
2.1.4 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	13
2.1.5 Kinerja Keuangan APBD	15
a) Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.....	15
b) Analisis Rasio Keuangan	15
1. Rasio Derajat Desentralisasi	16
2. Rasio Ketergantungan Daerah.....	16
3. Rasio Pertumbuhan	17

4.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	18
5.	Rasio Efektivitas PAD	18
6.	Rasio Keserasian	19
c)	Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah	20
2.2	Studi Pustaka	20
BAB III	24
METODA PENELITIAN	24
3.1	Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data	24
3.2	Langkah- langkah Penelitian	24
3.3	Gambaran Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur.....	25
a.	Kondisi Geografis.....	25
b.	Penduduk	25
c.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Timur	28
d.	Mata Pencarian Masyarakat Kabupaten Sumba Timur.....	29
e.	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	31
f.	Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Sumba Timur	32
BAB IV	33
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1	Analisis Hasil	33
1.	Rasio Desentralisasi	33
2.	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	34
3.	Rasio Pertumbuhan	35
4.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	36
5.	Rasio Efektivitas PAD	37
6.	Rasio Keserasian	38
4.2	Pembahasan	39
1.	Rasio Desentralisasi	39
2.	Rasio Ketergantungan Daerah	40
3.	Rasio Pertumbuhan.....	41
4.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	42
5.	Rasio Efektivitas PAD.....	43
6.	Rasio Keserasian	44
BAB V	48
KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1	Kesimpulan.....	48

5.2 Rekomendasi	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	53



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.....	5
Tabel 3. 1 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 1990,2010,2013 s/d 2020	26
Tabel 3. 2 Struktur Usia Penduduk Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020	27
Tabel 3. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Timur.....	28
Tabel 4.1 Rasio Desentralisasi Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018-2021....	33
Tabel 4.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018-2021	34
Tabel 4.3 Rasio Pertumbuhan Daerah Kabupaten	35
Tabel 4.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Timur	36
Tabel 5.5 Rasio Efektivitas PAD	38
Tabel 6.6 Rasio Keserasian (Belanja Operasi).....	39
Tabel 7.7 Rasio Keserasian (Belanja Modal).....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Sumba Timur 32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Keuangan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Dan hasil olah data.....	53
Lampiran 2 Halaman Persetujuan.....	58
Lampiran 3 Kartu Konsultasi.....	60
Lampiran 4 Lembar Revisi.....	62
Lampiran 5 Point Keaktifan.....	62
Lampiran 6 Hasil Turnitin.....	63



ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2018-2021

Rambu Anahida

12180272

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

rambu.anahida@students.ukdw.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan BKAD Kabupaten Sumba Timur tahun 2018-2021 dilihat dari : (1) Rasio Desentralisasi, (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, (3) Rasio Pertumbuhan (4) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan (5) Rasio Efektivitas PAD.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di (Pemda) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan rumus : Rasio Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas PAD.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BKAD Kabupaten Sumba Timur dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi dapat dikategorikan sangat kurang, karena rata-ratanya sebesar 8,66% (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dikategorikan sangat tinggi, karena rata-ratanya besar rasio ini 87,42% (3) Rasio Pertumbuhan Kabupaten Sumba Timur dapat dikatakan rendah, karena rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 10,34% sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur belum mampu untuk meningkatkan penerimaan PADnya (4) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah sekali karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 9,94% (5) Rasio Efektivitas PAD, efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Sumba Timur sudah cukup efektif karena rata-rata efektivitasnya sebesar 97,77%. (6) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu sebesar 73,80% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 20,34%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Kata kunci : Rasio Desentralisasi, Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Keserasian.

**ANALYSIS OF THE REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE
OF THE EAST SUMBA TIMUR IN 2018-2021**

Rambu Anahida

12180272

Accounting Studies Program Faculty of Business

Duta Wacana Christian University

rambu.anahida@students.ukdw.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the Financial Performance of the BKAD of East Sumba Timur in 2018-2021 seen from: (1) Decentralization Ratio, (2) Regional Financial Dependence Ratio, (3) Growth Ratio (4) Regional Financial Independence Ratio and (5) Effectiveness Ratio PAD.

This research is quantitative descriptive. This research was carried out at the Regional Finance and Assets Agency (Pemda) of East Sumba Timur. Data collection uses the documentation method. The data analysis technique used is descriptive quantitative with the formula: Decentralization Ratio, Regional Financial Dependency Ratio, Growth Ratio, Regional Financial Independence Ratio and PAD Effectiveness Ratio.

The results of the analysis show that the Financial Performance of the BKAD of East Sumba Timur as seen from (1) the Decentralization Ratio can be categorized as very less, because the average is 8.66% (2) The Financial Dependency Ratio can be categorized as very high, because the average ratio is very large This is 87.42% (3) The East Sumba Regency Growth Ratio can be said to be low, because the average growth ratio is 10.34% so it can be said that the East Sumba Timur Government has not been able to increase its PAD income (4) Regional Financial Independence Ratio still relatively low because the average size of this ratio is 9.94% (5) PAD Effectiveness Ratio, the effectiveness of East Sumba's financial performance is quite effective because the average effectiveness is 97.77%. (6) From the Harmony Ratio, it is known that the average regional operational expenditure is still very high at 73.80% compared to the average capital expenditure of 20.34%. Thus, it can be said that local governments still pay little attention to regional development.

Keywords: Decentralization Ratio, Effectiveness Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Growth Ratio and Harmony Ratio.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Dasar pengenaan pajak didasari oleh undang-undang. Pajak yang didapat dari masyarakat akan dimanfaatkan untuk pendanaan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sumber pendapatan yang memiliki 2 manfaat yakni (Mardiasmo 2011 1):

1. Fungsi Anggaran (*budgeter*)

Pajak adalah sumber penerimaan sebuah negara, maka pajak memiliki fungsi untuk membiayai belanja negara

2. Fungsi Mengatur (*regulasi*)

Pajak memiliki fungsi untuk membuat perkembangan ekonomi Indonesia menjadi teratur. Melalui peraturan pemerintah pajak secara tidak langsung akan bisa membantu ekonomi masyarakat dan negara.

Berdasarkan fungsi pajak diatas, pajak juga memiliki jenis-jenis sebagai berikut :

- a. Pajak Negara

Pajak negara merupakan pajak yang dilaksanakan pemungutan oleh pemerintah pusat. Pajak tersebut dimanfaatkan Untuk mendanai semua pembangunan. Tujuan dipungutnya pajak negara yaitu supaya pendapatan pemerintah daerah dapat merata

- b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah sumber penerimaan dari APBD yang fungsinya adalah untuk mendanai pembangunan dan aktivitas pemerintah daerah

Contohnya, salah satu wewenang yang yang diberi oleh pemerintah pusat terhadap Pemda adalah wewenang atas pemungutan retribusi daerah dan pajak daerah sebagai sumber pembiayaan di daerah yang yang telah ditetapkan pada UU No 28 Tahun 2009 mengenai Retribusi dan Pajak Daerah. Wewenang ini diberikan dengan tujuan dapat menguatkan posisi dan esensi otonomi untuk menunjang kapasitas fiskal daerah.

Kinerja atau performa merupakan cerminan suatu kinerja tentang pencapaian individu saat melakukan sebuah aktivitas yang dilaksanakan pada sebuah daerah dengan tujuan dapat mencapai visi dan misi Lembaga atau organisasi. Kinerja atau performa bisa dilihat melalui kriteria kesuksesan yang sudah ditentukan.

Pengukuran performa merupakan aktivitas untuk mengukur kesesuaian penerapan dengan tujuan yang sudah ditentukan. Langkah awal sebuah lembaga atau organisasi biasanya membuat misi dan visi, kebijakan dan falsafah. Berikutnya yaitu membuat rumusan tujuan, menyusun anggaran dan program, Target yang ingin dicapai, serta penentuan fungsi dan tugas harus merujuk pada *strategic planning* yang telah ditentukan.

Tujuan dari pengukuran performa keuangan adalah untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam suatu daerah dalam merealisasikan pendapatan daerahnya. Pengukuran Ini juga bisa digunakan untuk melihat seberapa jauh kegiatan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitasnya dan mengukur kontribusi dari setiap sumber penerimaan dalam pembuatan penerimaan daerah.

APBD adalah wujud manajemen keuangan daerah yang ditentukan setiap tahun dan didasari Peraturan daerah yang terdiri dari pembiayaan, belanja, penerimaan, Definisi tersebut berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 mengenai keuangan negara, undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemda, undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Otonomi daerah memberikan implikasi munculnya wewenang dan kewajiban untuk daerah supaya bisa melakukan bermacam aktivitas pemerintah dengan lebih Mandiri, tidak selalu tergantung dengan bantuan dari pusat mulai dari planning, pelaksanaan, controlling, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban.

Otonomi daerah merupakan bentuk dari sistem desentralisasi. Sebuah daerah akan diberi wewenang dan tanggungjawab untuk mengurus dan mengatur secara mandiri aktivitas pemerintahan dari masing-masing daerahnya. Dengan kebijakan seperti ini, diharapkan setiap daerah mampu untuk memanajemen sumber penerimaan dengan optimal untuk mendanai aktivitas pemerintah daerah. Sehingga diharapkan juga pemerintah daerah tidak ketergantungan terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Berikut merupakan aturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai pelaksanaan otonomi daerah :

1. Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3. Perpu No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah
5. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Kendala yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya suatu perbedaan dari kesiapan implementasi otonomi daerah dari masing-masing daerah. Tidak semua daerah juga yang memiliki keunggulan atau memiliki banyak sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Sebagai salah satu daerah yang otonom, pemerintah Kabupaten Sumba Timur harus dapat membuat penerimaan atau pendapatan asli daerah meningkat. Sebab, besarnya penerimaan yang di punya oleh daerah adalah gambaran dari kemandirian sebuah daerah. Jika Pendapatan asli daerah itu tinggi, maka dapat dikatakan daerah tersebut sudah mandiri sebab penyelenggaraan aktivitas yang dilaksanakan didanai oleh pendapatan asli daerah bukan dari pusat. Oleh karena itu, penerimaan daerah berupa PAD belum dapat diandalkan sebagai sumber yang utama penerimaan dalam APBD Kabupaten Sumba Timur.

Permasalahan yang timbul di Kabupaten Sumba Timur pada saat ini khususnya Kota Waingapu adalah munculnya Keterbelakangan terutama untuk masyarakat Sumba Timur yang lokasinya ada di desa. Aktivitas otonomi daerah yang berlaku sekarang pada desa tersebut membuat masyarakat Sumba Timur terutama masyarakat yang lokasinya berada di desa kembali pada masa lalu yang mana terdapat kepala wilayah atau kepala adat yang membuat tingkat kemiskinan menjadi tinggi dan ketidakadilan. Kondisi tersebut dapat muncul karena SDM

yang dimiliki rendah dan budaya pada desa tersebut sangat kuat terutama warga yang lokasinya bertempat tinggal di desa. Oleh karena itu, target pendapatan asli daerah masih belum mencapai target yang dihasilkan secara maksimal di Kabupaten Sumba Timur. Karena, masih rendahnya Sumber Daya Manusia.

Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur tahun 2018-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2018	75.375.667.964,35
2019	101.397.539.906,29
2020	92.336.687.883,40
2021	128.359.009.907,13

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumba Timur cenderung mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 75.375.667.964,35 dan pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp 101.397.539.906,29 Pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp 92.336.687.883,40 dan pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan kembali. Hal ini disebabkan karena banyak pemasukan Pendapatan Daerah salah satunya adalah pajak dan retribusi daerah.

Berikut ini komponen yang terdapat dalam Analisis SWOT :

1. *Strenghts* (Kekuatan)

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berkaitan dengan PAD yang yang menjadi kekuatan adalah adalah Potensi. Potensi di Kabupaten Sumba Timur cukup besar. Tetapi, pemerintah belum maksimal untuk mengelola potensi itu sendiri.

2. *Weaknesses* (Kelemahan)

Menunjukkan bahwa masih terjadi Kelemahan pada sisi Pengelolaan potensi PAD di Sumba Timur. Kurang optimalnya manajemen potensi pajak, pendapatan asli daerah, dan pendapatan retribusi. Potensi Pendapatan asli daerah dikarenakan tidak adanya data basis objek, pemetaan dan potensi pajak, besaran pajak, retribusi daerah, dan retribusi yang tidak berlandaskan data potensi yang semestinya bisa terealisasi serta kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi PAD itu sendiri, baik dari perencanaan potensi, pelaksanaan pengelola potensi maupun pengendalian pemanfaatan potensi peningkatan PAD.

3. *Opportunities* (Peluang)

Dukungan Pemerintah Sumba Timur untuk meningkatkan Pendapatan Daerahnya adalah dengan memberi peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan kinerja keuangan pembangunan daerahnya.

Sektor pariwisata adalah sumber penerimaan warga dan dan penerimaan daerah. objek wisata yang letaknya ada di Kabupaten Sumba Timur hanya terbatas wisata alam, namun terdapat objek wisata budaya yakni perkampungan sentra dan adat tenun ikat Sumba. Sektor pariwisata Tidak di manajemen dengan bagus terhadap sarana dan prasarana yang mendukung objek wisata tersebut, Padahal di sisi lain Kabupaten Sumba

Timur mempunyai kekayaan alam, budaya yang begitu banyak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyak sekali turis dari berbagai negara yang sudah mengenal dan menggunakan objek wisata

4. *Threats* (Ancaman)

Ancaman yang terjadi ketika PAD Kabupaten Sumba Timur masih kurang dalam pengelolaan PAD adalah dapat menimbulkan pendapatan menjadi tidak stabil dan pengelolaan PAD menjadi lambat untuk di kelola atau menjadi kurang optimal.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018-2021”

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah diuraikan, Maka dibuatlah perumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tahun dengan menggunakan alat ukur Rasio Desentralisasi?
2. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan alat ukur Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah?
3. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan alat ukur Rasio Pertumbuhan?
4. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan alat ukur Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?

5. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan alat ukur Rasio Efektivitas PAD?
6. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan alat ukur Rasio Keserasian?
7. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Analisis SWOT?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur pada periode 2018 hingga 2021 dengan menggunakan alat ukur rasio keuangan daerah yakni Rasio Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian dan Analisis SWOT

1.4 Kontribusi Penelitian

- Bagi Akademis
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi rujukan peneliti berikutnya yang ingin meneliti pada penelitian yang selaras
- Bagi Pemerintah atau instansi
Dapat menjadi saran untuk pemerintah agar ketika mengambil kebijakan untuk *planning* pembangunan dan pengambilan keputusan dapat membuat kinerja keuangan lebih efisien dan baik serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumba Timur.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan dari penelitian ini adalah hanya mengambil daerah penelitian di Pemerintah Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2018-2021. Kinerja keuangan

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah yaitu Rasio Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Keserasian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018-2021 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan Kabupaten Sumba Timur apabila dilihat dari rasio desentralisasi bisa digolongkan sangat kurang sebab ada pada 00,00-10,00%. Rasio tersebut terus terjadi selama tahun 2018 hingga 2021. Berikut rasio 2018 hingga 2021 secara urut 6,93%, 8,21%, 8,13% dan 11,37%.
2. Kinerja keuangan dari kabupaten Sumba Timur apabila dilihat dari Rasio ketergantungan daerah masih sangat besar. sebab kinerja keuangan ini masuk dalam golongan 50% - 100%. Berturut-turut dari tahun 2018-2021 dengan rasio masing-masing 88,75%, 87,97%, 87,85% dan 85,12% sehingga Ketergantungan Daerah yang sangat tinggi mengakibatkan Pembiayaan aktivitas pemerintahan dari kabupaten Sumba Timur masih bergantung kepada pemerintah pusat dan masih membutuhkan dana transfer dari pusat.
3. Kinerja Keuangan BKAD Kabupaten Sumba Timur jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur belum mampu mempertahankan dan meningkatkan penerimaan PAD. Karena, pada tahun 2018 hanya mencapai -23,25% dengan kategori pertumbuhan yang rendah, artinya bahwa potensi yang dalam sumber-sumber Pendapatan Asli

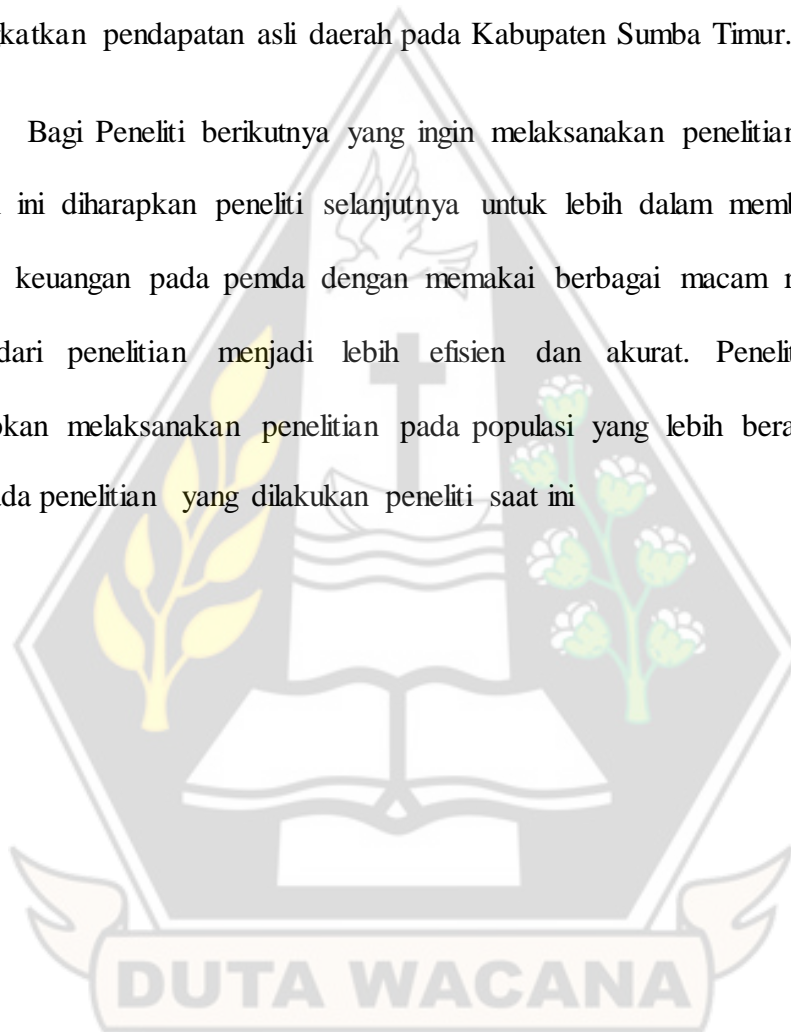
Daerah (PAD). Berturut-turut rasionya masing-masing sebesar -23,25% , 34,52%, -8,93% dan 39,01%.

4. Kinerja Keuangan BKAD Kabupaten Sumba Timur jika dilihat dari Rasio Kemandirian bahwa masih tergolong dalam kriteria rendah sekali dengan Kriteria 0% -25%. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya pemerintah daerah kurang Mandiri untuk mengatur otonomi dan masih didominasi oleh pemerintah pusat. Berturut-turut dari tahun 2019-2021 dengan rasio masing-masing sebesar 7,81%, 9,33%, 9,25% dan 13,36%.
5. Kinerja keuangan dari kabupaten Sumba Timur apabila jika dilihat dari rasio efektivitas Pendapatan asli daerah dapat lihat bahwa keefektifan keuangan dari kabupaten Sumba Timur mulai pada periode 2018 hingga 2021 itu masuk dalam kategori tidak efektif sebab nilai yang didapat ada lebih rendah dari 100% yaitu sebesar 77,49% pada tahun 2018. Tahun 2019,2020 dan 2021 sangat efektif karena efektivitas sudah di atas 100% yaitu sebesar 101,29%, 101,50% dan 110,81%.
6. Kinerja Keuangan Kabupaten Sumba Timur Apabila dilihat dari rasio keserasian maka kinerja keuangan dari kabupaten Sumba Timur masih belum stabil dari periode ke periode. Dari laporan keuangan Kabupaten Sumba Timur dapat dilihat bahwa pembiayaan belanja operasi jauh lebih tinggi daripada belanja modal. belanja operasi memiliki besar yaitu 73,80% hal tersebut karena jumlah pegawai negeri sipil dan dinas bertambah, sehingga mengakibatkan belanja operasi tinggi. Sementara untuk belanja modal besaran yang dikeluarkan yaitu 20,34%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kurang memberi perhatian kepada pembangunan

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat merekomendasikan kepada Pemerintah Sumba Timur untuk membuka peluang bagi investor masuk ke Sumba Timur agar dapat berupaya memperbaiki pembangunan infrastruktur dengan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pelayanan publik sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Sumba Timur.

Bagi Peneliti berikutnya yang ingin melaksanakan penelitian yang selaras dengan ini diharapkan peneliti selanjutnya untuk lebih dalam membahas tentang kinerja keuangan pada pemda dengan memakai berbagai macam rasio sehingga hasil dari penelitian menjadi lebih efisien dan akurat. Peneliti berikutnya diharapkan melaksanakan penelitian pada populasi yang lebih beragam dan luas dari pada penelitian yang dilakukan peneliti saat ini



DAFTAR PUSTAKA

- Ngangi, A. I., Murni, S., dan Untu, V. N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal EMBA*, Vol.6 No.4, 4103 – 4112. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba>. Diakses tanggal 13 Juni 2022
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 3, 43-59. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.22>
- Kisman Lantang. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten poso. *Ekomen*, 18(2), 20-29. <https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/EkoMen/article/view/332>
- Fitra, H., Mukhlis, F., & Dani, S. R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran: Studi Kasus Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE)*, 10(1), 25. <https://doi.org/10.24036/011084400>
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Remaja Rosdakarya : Bandung
- Mangantar, Pandensol. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Sitaro”
- Sumarjo. (2010). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Syamsi. (1986 : 99). *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali
- Awani & Hariani (2021). *Analisis Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 3(2), 95-102.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mahmudi. (2016). Dalam Buku Karangan “Analisis Kinerja Keuangan APBD”
- Bambang Rianto (1998:253). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi 4, BPFPE
- Janes C. Horne (1998:9). Dalam bukunya “*Finance Management Policy*”
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Perpu No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur. *Data Pendapatan Asli Daerah*.

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. www.sumbatimurkab.go.id (Diakses 8 juli 2022)

